

TESIS

**KEWENANGAN PERAWAT GIGI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK
KEDOKTERAN GIGI MENURUT SK MENKES NOMOR 1392 TAHUN 2001
TENTANG REGISTRASI DAN IZIN KERJA PERAWAT GIGI
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 29
TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
(Studi Kasus di Puskesmas Kota Salatiga)**

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Derajat Sarjana S2
Program Studi Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh:

Khoirul Anam

NIM. 07.93.0014

Kepada

Program Pascasarjana

Magister Hukum Kesehatan

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

2010

**KEWENANGAN PERAWAT GIGI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK
KEDOKTERAN GIGI MENURUT SK MENKES NOMOR 1392 TAHUN 2001
TENTANG REGISTRASI DAN IZIN KERJA PERAWAT GIGI
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 29
TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
(Studi Kasus di Puskesmas Kota Salatiga)**

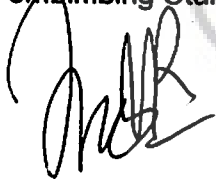
Diajukan oleh:

Khoirul Anam

NIM. 07.93.0014

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Yovita Indrayati, SH., M.Hum

Tanggal..... 9/08/2010

Pembimbing Pendamping



Dr. Djoko Widyarto JS, DHM., MH.Kes

Tanggal..... 09/08/2010



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : KHOIRUL ANAM

Nim : 07.93.0014

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Rabu, 30 Juni 2010

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Prof. Dr. A. Widanti S., SH., CN (.....)

2. dr. Djoko Widyarto JS, DHM., MH.Kes (.....)

3. Yovita Indrayati, SH., MHum (.....)

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Rabu, 30 Juni 2010


(Prof. Dr. A. Widanti S., SH. CN)
Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, ALLAH S.W.T yang mana dengan izin-Nya Tesis ini dapat terselesaikan, serta sholawat dan puji saya ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W.

Tesis ini di susun berdasarkan pengalaman peneliti selama bekerja di Puskesmas dan di Dinas Kesehatan. Peneliti sebagai tenaga medis di Puskesmas, merasaksan bahwa kewenangan dokter gigi dan perawat gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan masih banyak terjadi permasalahan. Peneliti juga melakukan analisa tentang peraturan-peraturan yang terkait dan menemukan bahwa ada ketidaksinkronan peraturan-peraturan yang ada.

Kewenangan perawat gigi dalam melakukan tindakan medik terbatas di bidang kedokteran gigi telah diatur dalam SK Menteri Kesehatan Nomor 1392 Tahun 2001 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada permasalahan-permasalahan. Salah satu contohnya adalah perawat gigi melakukan tindakan medik terbatas di bidang kedokteran gigi tanpa ada proses pelimpahan dari dokter gigi.

Tujuan dari penelitian ini yang adalah memberikan gambaran dan implementasi tentang kewenangan perawat gigi dalam melakukan tindakan medik terbatas di bidang kedokteran gigi di Puskesmas Kota Salatiga setelah berlakunya UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Peneliti juga melakukan analisa tentang tanggung jawab, apa bila terjadi dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter gigi dan perawat gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (*social-legal approach*) dengan pendekatan aspek yuridis dan sekaligus membahas aspek-aspek sosial yang terjadi dilapangan. Jenis data dalam tesis ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan daftar pertanyaan, sedangkan data sekunder berupa dari kepustakaan dan data-data yang menunjang penelitian.

Hasil penelitian didapatkan bahwa ada ketidaksinkronan antara SK Menteri Kesehatan Nomor 1392 Tahun 2001 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi dengan SK Menteri Kesehatan Nomor 378 Tahun 2007 Tentang Standar Profesi Perawat Gigi. Kurikulum pendidikan perawat gigi juga tidak

didapatkan adanya tindakan medik terbatas di bidang kedokteran gigi sehingga secara kompetensi perawat gigi tidak bisa di beri kewenangan untuk melakukan tindakan medik terbatas ini. Puskesmas di Kota Salatiga belum memiliki peraturan yang mengatur tentang pelimpahan sebagian kewenangan dokter gigi kepada perawat gigi, dokter gigi dan perawat gigi tidak semua mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan profesinya, sehingga Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi mensosialisasikan peraturan-peraturan yang ada, sehingga dokter gigi dan perawat gigi mengetahuinya dengan baik.

Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Tesis ini, yaitu:

1. Orang tua saya (Bpk. Djaelani dan Ibu Umi Kulsum) tercinta.
2. Prof. DR. Agnes Widanti S., SH., CN yang telah membimbing saya dalam pembuatan proposal Tesis sekaligus sebagai penguji.
3. Ibu Yovita Indayati, SH., M.Hum yang selama ini telah membimbing saya selama penelitian sampai selesai, saya mohon maaf kalau selama bimbingan ada kesalahan yang saya lakukan.
4. Dr. Djoko Widyarto JS, DHM., MH.Kes sebagai pembimbing yang dengan sabar memberikan masukan-masukan kepada saya, tidak lupa saya meminta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan saya selama bimbingan.
5. Semua dosen-dosen saya di Unika yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesabaran dalam mendidik dan ilmunya semoga bermanfaat buat saya, institusi tempat saya bekerja serta bangsa dan negara.
6. Istri saya (dr. Nur Hidayati) tercinta yang telah memberikan dorongan dalam menyelesaikan Tesis ini, semoga spesialisnya cepat selesai.
7. Anak pertama saya (Mochammad Dzaki Raissa) semoga menjadi anak yang lebih baik dari pada kedua orang tuanya.
8. Mertua saya (Bpk. dr. Moch. Thohar Rosad, Sp. KK dan Ibu Rukmiwati) yang telah mendorong saya supaya Tesis ini cepat selesai.
9. Adik-adik saya (Hepi dan Heni) yang telah memberi semangat.
10. Teman-teman seangkatan (dr. Retno, dr. Farhat, Bu Mamik, Bu Juraida, Pak Didik, Arcan, Pak Marno).

11. Semua civitas akademika Universitas Katolik Soegijapranata (Mbak Puji, Mas Fatrik, Mbak Indra, Mas Kas) terima kasih atas bantuannya selama ini.
12. Kepala Dinas Kota Salatiga beserta stafnya, terima kasih atas bantuannya dalam penelitian.
13. Kepala Puskesmas se-Kota Salatiga beserta stafnya terima kasih atas bantuannya dalam melakukan penelitian.

Demikian semoga Tesis ini bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan saya, terima kasih.



Semarang, 30 Juni 2010

Penulis

Daftar Isi

Halaman

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Lampiran	x
Halaman Pernyataan.....	xi
Abstrak.....	xii
Daftar Isi	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Perumusan masalah.....	10
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Metode penelitian.....	12
F. Penyajian tesis.....	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perawat gigi.....	17
a. Pengertian perawat gigi.....	17
b. Konsep keperawatan gigi.....	18
c. Kualifikasi pendidikan.....	19
d. Standar pendidikan dan kurikulum pendidikan.....	20
e. Kewenangan perawat gigi.....	22
B. Standar kompetensi.....	28
C. Tindakan medik.	29
D. Kewenangan dokter gigi.....	31
E. Kewenangan perawat gigi dalam melakukan tindakan medik terbatas di bidang kedokteran gigi.....	35
F. Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan.....	40
a. Sanksi disiplin.....	42
b. Sanksi administrasi.....	45

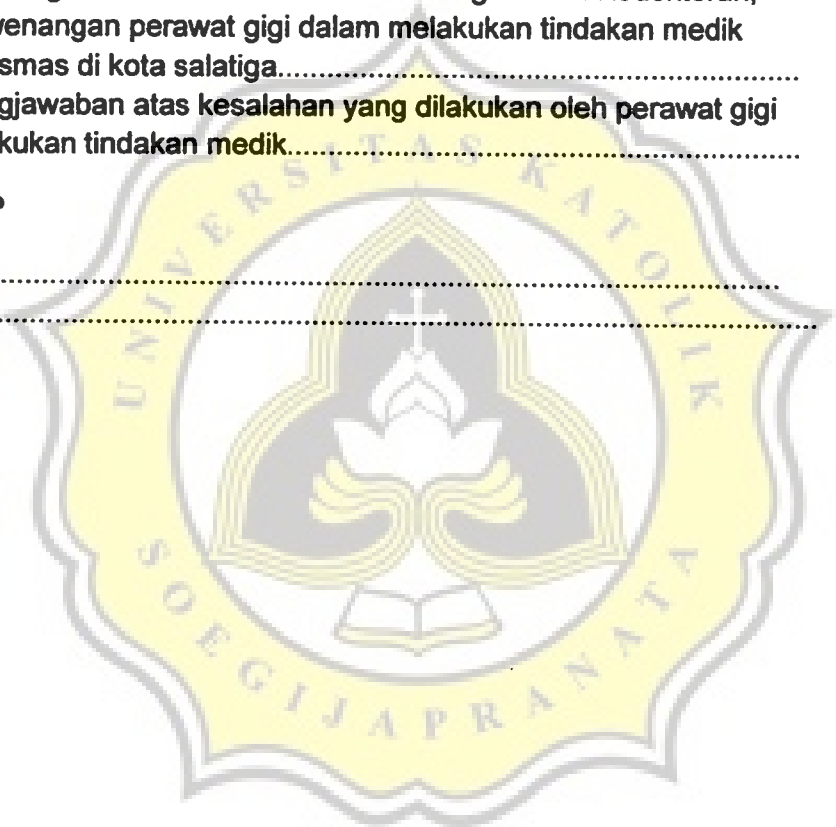
c. Sanksi perdata.....	46
d. Sanksi pidana.....	49
G. Diagram kerangka pemikiran.....	56

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum.....	57
B. Kewenangan perawat gigi dalam melakukan tindakan medik menurut Surat Keputusan Menkes Nomor 1392 Tahun 2001 Tentang Registrasi Dan Izin Kerja Perawat Gigi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.....	61
C. Implementasi pelaksanaan Surat Keputusan Menkes Nomor 1392 Tahun 2001 Tentang Registrasi Dan Izin Kerja Perawat Gigi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, tentang kewenangan perawat gigi dalam melakukan tindakan medik pada puskesmas di kota salatiga.....	68
D. Pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh perawat gigi dalam melakukan tindakan medik.....	82

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan.....	87
B. Saran.....	93



Daftar Tabel

Judul Tabel	Halaman
Tabel 1. Penyebutan responden.....	61
Tabel 2. Lama responden bekerja di Puskesmas.....	61
Tabel 3. Surat izin yang dimiliki oleh dokter gigi.....	65
Tabel 4. Surat izin yang dimiliki oleh perawat gigi.....	65
Tabel 5. Persepsi dokter gigi dan perawat gigi tentang kompetensi, kewenangan dan wewenang.....	76
Tabel 6. Asal kewenangan dokter gigi dan perawat gigi.....	78
Tabel 7. Persepsi tentang perawat gigi melakukan tindakan medik terbatas di bidang kedokteran gigi.....	79
Tabel 8. Tindakan medik yang boleh dilakukan oleh perawat gigi.....	80
Tabel 9. Tanggung jawab atas kesalahan dalam tugas limbah.....	83
Tabel 10. Macam sanksi untuk tenaga kesehatan.....	84

Daftar Lampiran

Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Matrik kewenangan perawat gigi.	99
Lampiran 2. Matrik Tupoksi dokter gigi dan perawat gigi.	101



Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Khoirul Anam, peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 07.93.0014

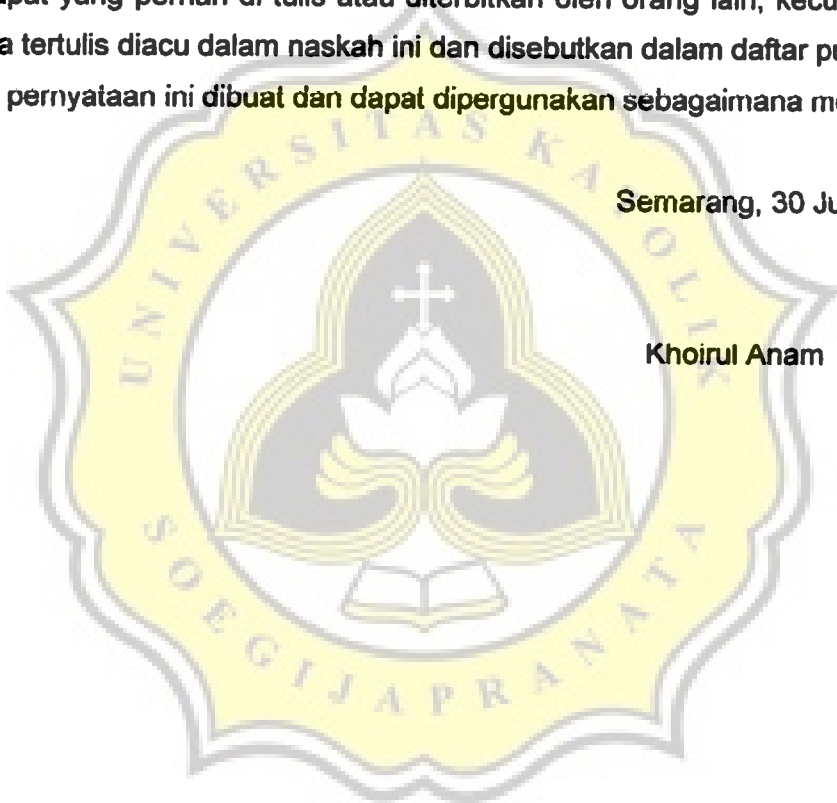
Menyatakan:

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Juni 2010

Khoirul Anam



Abstract

Authority of dental nurses in the medical action is limited in the field of dentistry set out in the Health Ministerial Decree Number 1392 Year 2001 About the Registrar and Dental Nurses Work Permits, but in practice there are still problems. The Purpose of this study was to describe the authority of dental nurses in the medical action according to Minister of Health Decree Number 1392 year 2001 Registration and Work Permits About Dental Nurses and describes the implementation of the authority of dental nurses in conducting medical act by decree Minister of Health Number 1392 Year 2001 About Registration and Work Permits Dental Nurses after the enactment of Law Number 29 Year 2004 About the Practice of Medicine, at the Health Center in the city of Salatiga, and provide a snapshot of who is legally responsible for errors made by a dental nurse in a medical act.

Research conducted using the method of judicial and sociological research (socio-legal approach) with the juridical aspects of the approach and simultaneously discuss the social aspects that occur in the field. Type of data in this thesis are the primary data and secondary data. Primary data by observation, interviews and questionnaires, while secondary data from the literature and data that support the research.

The results showed that there were not synchronous between Decree Minister of Health Number 1392 Year 2001 and Health Ministerial Decree Number 378 Year 2007 About Dental Nurse Professional Standards. Dental nurse education curricula was also not found any medical action in the field of dentistry is limited so that the competencies of dental nurses do not have the competence that can not be given authority to conduct this limited medical action. Public Health Center in Salatiga city does not yet have regulations governing the delegation of some authority to the dentist and dental nurse and dentist. Dental nurse did not all know about the legislation in force, and associated with the profession. Department of Health and Professional Organizations should actively promote legislation that exists.

Key words: dental nurse, Authority, limited medical action, health centers, professional standards, professional organizations.

Abstrak

Kewenangan perawat gigi dalam melakukan tindakan medik terbatas di bidang kedokteran gigi telah diatur dalam SK Menteri Kesehatan Nomor 1392 Tahun 2001 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada permasalahan-permasalahan. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang kewenangan perawat gigi dalam melakukan tindakan medik menurut SK Menkes Nomor 1392 tahun 2001 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi dan memberikan gambaran tentang implementasi pelaksanaan kewenangan perawat gigi dalam melakukan tindakan medik menurut SK Menkes Nomor 1392 tahun 2001 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pada Puskesmas di Kota Salatiga, serta memberikan gambaran tentang siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan yang dilakukan oleh perawat gigi dalam melakukan tindakan medik.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (*social-legal approach*) dengan pendekatan aspek yuridis dan sekaligus membahas aspek-aspek sosial yang terjadi dilapangan. Jenis data dalam tesis ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan daftar pertanyaan, sedangkan data sekunder berupa dari kepustakaan dan data-data yang menunjang penelitian.

Hasil penelitian didapatkan bahwa ada ketidaksinkronan antara SK Menteri Kesehatan Nomor 1392 Tahun 2001 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi dengan SK Menteri Kesehatan Nomor 378 Tahun 2007 Tentang Standar Profesi Perawat Gigi. Kurikulum pendidikan perawat gigi juga tidak didapatkan adanya tindakan medik terbatas di bidang kedokteran gigi sehingga secara kompetensi perawat gigi tidak mempunyai kompetensi sehingga tidak bisa di beri kewenangan untuk melakukan tindakan medik terbatas ini. Puskesmas di Kota Salatiga belum memiliki peraturan yang mengatur tentang pelimpahan sebagian kewenangan dokter gigi kepada perawat gigi, dokter gigi dan perawat gigi tidak semua mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan profesinya. Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi hendaknya secara aktif mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata kunci : Perawat gigi, Kewenangan, tindakan medik terbatas, Puskesmas, standar profesi, organisasi profesi.